

NILAI-NILAI DEMOKRASI, PEMILU, DAN SITUASI SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU 2004

Oleh: Dr. Iberamsjah, MS*

Pendahuluan

Konsep yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan adanya pelaksanaan suatu pemilihan umum adalah konsep demokrasi. Bahkan usaha untuk membangun masyarakat yang demokratis adalah suatu keharusan. Adanya gerakan reformasi yang bermula pada Mei 1998 tidak lain adalah usaha mengembangkan sistem politik negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Usaha tersebut kemudian dikenal dengan “demokratisasi sistem politik”.

Pertanyaan selanjutnya adalah makna atau pengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah suatu konsep politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan/memerintah. Jadi makna demokrasi adalah rakyat yang berkuasa/memerintah. Dalam berbagai konsep politik, secara lebih luas diartikan dengan sebuah sistem pemerintahan dimana kedaulatan

didasarkan pada kehendak mayoritas rakyat. Kedaulatan di sini diterjemahkan lewat suatu mekanisme yang mampu mengakomodir dan merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan demokrasi sebagai suatu sistem politik seringkali mengalami hambatan rakyat. Berbagai usaha untuk mencari dan memperbandingkan sistem-sistem politik seperti komunis, sosialis, liberalis, dan demokrasi.

Demokrasi Sebagai Suatu Sistem Politik

Sistem politik demokrasi, sebagaimana dikemukakan di atas telah menjadi pilihan banyak negara modern. Gelombang demi gelombang demokratisasi kemudian melanda dunia, kendati gelombang tersebut diikuti arus balik demokratisasi. Meskipun demikian, secara kuantitatif angka-angka negara demokrasi didunia mengalami perkembangan yang signifikan. Se-

* Dosen, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Strategi Sosial Politik FISIP UI.

jumlah transisi terjadi di beberapa negara yang mulanya menganit sistem otoritarian, baik itu berupa rezim militer, fasis, ataupun komunis. Hal ini mengundang beberapa kajian sejumlah ahli politik untuk menjawab pertanyaan mengapa demokrasi menjadi pilihan dan alasan apa saja yang menjadikan demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang dianggap baik.

Robert A. Dahl (1992) menyatakan sepuluh proposisi dan argumentasi mengapa demokrasi dianggap sebagai sistem yang lebih baik dapat dilaksanakan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 1) Demokrasi mencegah sistem pemerintahan otokrasi yang kejam dan sewenang-wenang.
- 2) Demokrasi menjamin hak-hak fundamental warga negara, yang oleh sistem lain seringkali tidak dijamin.
- 3) Demokrasi lebih menjamin kebebasan warga negaranya dibanding sistem lain.
- 4) Demokrasi membantu warga negaranya melindungi kepentingan fundamentalnya.
- 5) Hanya pemerintahan demokrasi yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warganya untuk menentukan nasibnya sendiri, yakni hidup

dasar hukum yang sudah ditetapkan.

- 6) Hanya pemerintahan demokrasi yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga negaranya untuk melakukan tanggung jawab moral.
- 7) Demokrasi lebih dapat menjamin perkembangan kemanusiaan/*human development*.
- 8) Demokrasi lebih menjamin kesetaraan politik antara warganya.
- 9) Sistem demokrasi representatif modern menghindari perang terhadap negara lain.
- 10) Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi cenderung lebih makmur dibanding sistem lainnya.

Selanjutnya, Dahl (1992) juga menjelaskan beberapa lembaga politik yang diperlukan oleh sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

- 1) Wakil rakyat yang dipilih rakyat.
- 2) Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.
- 3) Kebebasan berpendapat.
- 4) Tersedianya informasi alternatif.
- 5) Tersedianya otonomi asosiasional.
- 6) Hak warga negara yang inklu-

Demokrasi bukan merupakan ideologi dan sistem politik yang harus merusak kesatuan bangsa, tetapi demokrasi justru ditujukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi adalah ideologi yang menghargai perbedaan masyarakat di mana perbedaan pendapat tetap dihargai. Namun demikian, demokrasi tidak hanya dapat dikatakan sebagai sistem politik, namun juga dikatakan sebagai budaya politik yang terdiri dari nilai-nilai yang menjadi sikap hidup masyarakat.

Demokrasi Sebagai Suatu Tatanan Nilai

Kita telah membahas demokrasi sebagai suatu sistem politik dan sistem pemerintahan, karena inilah yang banyak dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Pada sudut pandang yang lainnya, konsep demokrasi juga dapat dilihat sebagai suatu tatanan nilai (*value*). Tatanan diartikan sebagai pedoman atau patokan-patokan bagi perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada posisi ini, demokrasi diartikan sebagai tata masyarakat politik. Dalam hubungan ini, Henry B. Mayo (1960) telah mencoba untuk merinci nilai-nilai tersebut, dengan catatan bahwa tidak semua masyarakat menganut nilai yang akan diperinci ini. Hal

tersebut bergantung pada perkembangan sejarah nilai budaya politik masing-masing masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut adalah:

- 1) Menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai tingkat minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar suatu perbedaan.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

Beberapa nilai yang dirumuskan di atas adalah sebagai syarat demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, suatu negara apabila ingin disebut negara demokratis harus mampu mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat mendasari perilaku masyarakat dan pemerintah.

Dalam hubungan dengan konsep demokrasi sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupannya di masyarakat, perlu rasanya kita mengutip 2 hasil penelitian empiris di masyarakat DKI Jakarta.

1. Penelitian tentang Anarkisme dan Pemahaman Demokrasi

Penelitian pada masyarakat menengah di DKI Jakarta. Sebagai kerja sama IAIN dengan Pemda DKI Jakarta pada tahun 2001. Temuan penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi berpengaruh pada sikap anarkis masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap demokrasi, semakin rendah kecenderungan untuk berbuat anarkis. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat berbuat ke arah yang anarkis adalah ketidaktahuan mereka terhadap konsep nilai demokrasi yang benar.

2. Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Pemilu 2004, penelitian ini merupakan kerjasama Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik FISIP UI dengan Pemda DKI Jakarta. Terungkap bahwa masyarakat "menengah-bawah" di DKI Jakarta kurang memahami nilai-nilai demokrasi sehingga kadang dalam kehidupannya dapat melakukan tindakan anarki. Penelitian dilakukan pada Juni-Desember 2003

Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam sejarah politik bangsa Indonesia kita mengalami banyak pemilihan umum. Pada masa Orde Lama, tepatnya sepuluh tahun setelah kita merdeka, yaitu pada tahun 1955 kita melakukan pemilu yang pertama. Pemilu 1944 ini dilakukan dalam suasana kebebasan agi banyak partai politik dan para politisi untuk menjadi anggota legislative. Selanjutnya pada masa Orde Baru telah dilakukan enam kali pemilu, yaitu pada tahun: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan pada tahun 1997. Suasana pemilu yang dilakukan atas dasar pengaturan dan pembatasan yang dilakukan oleh penguasa saat itu tidak banyak berarti bagi kehidupan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Setelah masa reformasi dilakukan pemilu 1999, yang kembali didasarkan pada semangat kebebasan dan demokrasi.

Pemilu-pemilu yang berlangsung dalam suasana dan kondisi politik yang berbeda tersebut semuanya dilakukan dengan sistem perwakilan berimbang (proportional representative). Dalam berbagai pemilu (8 kali) tersebut yang menarik untuk diambil pelajaran adalah semuanya lebih menghasilkan wakil yang lebih berpihak pada partai politik yang diwakilinya dari-

Bagaimana pemilu yang akan kita lakukan pada 5 April 2004 nanti, yang akan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka? Dengan berdasarkan UU No. 12 tahun 2003, tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU NO. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dapat kita simpulkan beberapa perbedaan Pemilu 2004 dengan Pemilu-pemilu yang lalu, antara lain:

- 1) Dari sudut sistem Pemilu yang dipakai, Pemilu 2004 akan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Dalam sistem ini, pemilih di samping akan memilih tanda gambar partai politik, juga akan memilih nama calon legislatif yang terdaftar di bawah tanda gambar partai politik. Dengan kata lain pemilih akan memilih Partai Politik dan calon legislatif yang diajukannya.
2. Pada Pemilu 2004, di samping memilih DPR, DPRD I, DPRD II, pemilih juga akan memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Khusus pe-

serta wakil presiden secara langsung, adalah sejarah baru atau pertama kalinya selama Indonesia merdeka dalam sejarah politik bangsa Indonesia.

- 3) Pada Pemilu 2004, ditandai pula dengan tidak adanya lagi 38 anggota TNI/Polri dari lembaga legislatif (Jatah kursi TNI/Polri di legislatif telah berakhir). Jadi seluruh anggota DPR-RI yang berjumlah 520 orang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
- 4) Pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada tingkat daerah. Demikian juga lembaga pengawas Pemilu disebut dengan Panwaslu. Lembaga pengawas ini juga bersifat independen baik pusat maupun daerah.
- 5) Salah satu yang juga menarik dalam Pemilu 2004 adalah tentang kuota 30% perempuan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, kuota caleg perempuan diwajibkan sebesar 30% (UU No. 12 tahun 1999). Hal ini jelas untuk mendorong pemberdayaan politik

Beberapa hal baru tersebut sangat menarik bila ditinjau dari sudut pandang reformasi politik. Sayangnya beberapa pembaharuan tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh, khususnya pada masyarakat di daerah. Khususnya untuk tata cara pencoblosan perlu sosialisasi yang intensif dan menyeluruh. Di lain pihak, Pemilu 2004 yang demikian penting bagi kelangsungan demokrasi dan pemerintahan ini dihadapkan pada berbagai situasi politik yang kurang menguntungkan seperti yang dibahas di bawah ini.

Beberapa Situasi Sosial Politik Menjelang Pemilu 2004

Pemilu yang akan dilaksanakan pada 5 April 2004 tidak akan berlangsung di ruang hampa sosial, Pemilu akan berlangsung dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan yang terkait satu sama lain baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik.

Kecenderungan yang sama pada setiap pemilu adalah memuncaknya suhu politik. Suhu politik tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakatnya. Untuk situasi pemilu 2004 dapat kita lihat beberapa hal sebagai

1. Krisis multidimensi yang berkepanjangan membuat kondisi masyarakat dalam keadaan ketidakpastian nilai dan nyaris tanpa harapan, mendorong pada situasi politik yang kering dan mudah terbakar. Kondisi masyarakat berpengaruh pada perilaku politik masyarakat. Dengan kata lain masyarakat sebagai suatu sistem saling terkait antar bagian dengan bagian lainnya. Situasi politik dewasa ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Kondisi masyarakat yang semakin hari semakin sulit dari segi ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta berbagai masalah kriminalitas yang semakin tinggi, membuat sangat sulitnya dicapai suatu kondisi yang kondusif bagi perkembangan politik yang damai.
2. Krisis berkepanjangan tersebut di atas serta belum adanya tanda-tanda ke arah perbaikan yang signifikan pada kehidupan masyarakat menyebabkan rakyat nyaris kehilangan kepercayaan pada sistem politik yang berlangsung dewasa ini. Faktor "kepercayaan" adalah suatu nilai dan modal yang hakiki bagi terselenggaranya suatu pemerintahan yang *legitimate*

stabil secara politik. Sangat sulit dibayangkan adanya pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya nilai kepercayaan dari masyarakatnya. Dari sudut pandang lain, tanpa nilai kepercayaan dari masyarakat, maka masyarakat sendiri kurang merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap jalannya sistem politik/pemerintahan, yang kemungkinan besar akan berdampak pada ketertiban umum.

3. Belum nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh pemerintah membuat masyarakat menjadi sinis dan apatis terhadap penegakan hukum. Kondisi ini dapat mendorong hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di tanah air. Dalam hal penegakkan hukum, khususnya dalam kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang sepertinya sudah menjadi "budaya" di Indonesia, masyarakat sudah tidak mempunyai harapan lagi, bahkan cenderung apatis bahwa aparat negara dapat menuntaskan masalah KKN di Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang terjadi di depan mata

aparat birokrasi dan mulai tingkat terendah sampai tingkat tinggi, bahkan yang melibatkan lembaga legislatif, sudah sangat melukai hati nurani masyarakat, karena tidak pernah ada penyelesaian yang jelas mengenai kasus-kasus ini, bahkan beberapa orang pejabat yang menjadi tersangka utama justru dibebaskan. Bandingkan dengan di negara Cina (RRC), negara yang gencar mengkampanyekan hukuman mati bagi para koruptor, bahkan sudah ada beberapa orang pejabat di negara tersebut yang dieksekusi mati. Gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh mahasiswa, LSM, atau unsur masyarakat lainnya dianggap seperti angin lalu saja. Harapan besar masyarakat yang digulirkan melalui Gerakan Reformasi tahun 1998, dan harapan adanya pemerintahan baru yang demokratis dan bersih dari KKN melalui Pemilu 1999 telah dilupakan begitu saja.

4. Gejala separatisme dan berbagai bentuk ketidakpuasan daerah juga dapat berdampak pada perkembangan situasi politik dewasa ini. Hubungan yang kurang baik ini akibat sistem sentralisasi kekuasaan selama lebih 30 tahun lebih

telah menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan pada pemerintah pusat. Daerah-daerah yang potensial dan memiliki sumber alam yang sangat kaya, tetapi justru masyarakatnya tetap tidak berdaya secara ekonomi karena semua hasil kekayaan dan sumber alam tersebut lebih banyak "ditarik" ke pusat. Hal ini juga dapat mendorong terjadinya sentimen kedaerahan yang berlebihan yang berujung pada separatisme dan menjadikan situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu 2004.

5. Konflik internal partai politik maupun antar partai politik yang akan semakin meningkat menjelang kampanye dan hari pemilihan umum dapat memacu tingginya suhu politik. Konflik-konflik ini dapat mendorong konflik masyarakat secara lebih luas. Pada Pemilu 2004 ini, konflik diperkirakan akan semakin marak dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, khususnya Pemilu tahun 1999 yang lalu. Kalau pada Pemilu yang lalu, konflik-konflik yang terjadi pada umumnya terjadi antar partai politik, tetapi pada Pemilu 2004, konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik in-

ternal partai politik itu sendiri. Masalah pemilihan pemimpin daerah seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, hingga pencalonan legislatif dan eksekutif yang diwarnai pro kontra dikalangan partai itu sendiri, sangat berperan dalam meningkatkan suhu politik menjelang Pemilu 2004 nanti.

6. Kekurangpercayaan sebagian masyarakat terhadap para politik, yang mereka sebut sebagai "Politisi Busuk". Politisi-politisi (busuk) tersebut kini ramai "bangkit kembali" bahkan mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota legislatif. Hal ini secara khusus dapat meningkatkan pemilihan golongan putih (golput). Gerakan moral yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih atau tidak ikut serta dalam Pemilu 2004 ini didasarkan pada pengalaman yang menimbulkan kekecewaan pada politisi tersebut di masa lalu. Gerakan yang bersifat gerakan moral ini apabila dilakukan secara meluas akan dapat menimbulkan kebingungan dan apatisisme masyarakat serta akan dapat mempengaruhi kondisi dan suhu politik menjelang pemilihan

7. Kinerja penyelenggara pemilihan umum, khususnya KPU Pusat. Berbagai kegiatan KPU sering menjadi sorotan pers dan masyarakat (LSM). KPU yang lebih banyak terlibat dalam pengadaan logistik pemilu juga sering dikritik. Kinerja panwaslu untuk menangani berbagai cara partai politik untuk curi start juga masih diragukan. Kedua lembaga yang akan menentukan suksesnya pemilu 2004 di Indonesia tersebut berpengaruh pada situasi politik menjelang pemilu 2004. KPU Pusat banyak disorot dalam hal pengadaan perlengkapan pemilu berupa kotak suara, kertas suara, tinta pemilu, pembelian mobil dinas dan pengadaan rumah dinas yang menggores nurani masyarakat. Pada umumnya masyarakat terhadap anggota KPU, yang seharusnya independen dan sebagian besar berasal dari lingkungan perguruan tinggi, pada kenyataannya menunjukkan kinerja yang tidak lebih baik dari penyelenggara pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga tidaklah berlebihan apabila singkatan KPU diplesetkan oleh sebagian anggota masyarakat dari Komisi Pemilihan Umum menjadi "Komisi Proyek Untukku". Kinerja lembaga KPU ini juga akan berpengaruh pada situasi pemilu 2004.
8. Situasi politik lain yang juga sangat berpengaruh adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dari berbagai penelitian di DKI Jakarta menunjukkan kurang dan atau terbatasnya pengetahuan masyarakat, terutama menengah ke bawah, tentang nilai-nilai demokrasi dan anarki. Kondisi ini dapat memacu situasi politik yang kurang kondusif dalam menghadapi pemilu. Disinilah terlihat hubungan antara pendidikan politik dan situasi masyarakat sangat berkaitan antara satu dengan lainnya. Keterbatasan pengetahuan sebagai dampak dan kurangnya pemberdayaan politik bagi masyarakat menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi oleh nilai-nilai negatif yang merugikan stabilitas masyarakat. Berbagai protes dan gerakan masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik. Lebih jauh lagi, hal ini juga berpengaruh pada perilaku politik masyarakat.

rakat yang pada akhirnya berdampak pada situasi politik pemilu 2004 yang akan datang.

9. Konflik horizontal. Perilaku masyarakat rawan konflik serta tawuran antar warga, kelompok masyarakat, dan antar pelajar/mahasiswa juga dapat memunculkan situasi politik yang tidak mendukung terselenggaranya pemilu yang aman dan damai. Konflik yang dipacu oleh ketidakpastian nilai dan himpitan kesulitan ekonomi sangat berpengaruh pada situasi KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat). Hal ini tentu saja akan menyulitkan penyelenggaraan pemilu. Tanpa stabilitas dan dukungan masyarakat maka sulit diharapkan terciptanya pemilihan umum yang lancar. Jadi situasi KAMTIBMAS adalah modal dasar terselenggaranya pemilu yang aman dan damai. Jadi apabila kita amati situasi KAMTIBMAS menjelang pemilu 2004 dapat dikatakan masih kurang mendukung pemilu 2004 yang akan kita laksanakan.

10. Terbatas dan kurangnya sosialisasi tentang pemilu yang memperkenalkan cara-cara baru juga sangat berpengaruh pada situasi menjelang pemilu.

Sebagian besar warga masyarakat kalangan bawah kurang atau bahkan belum mengerti tentang tata cara pelaksanaan pemilu. Demikian juga dengan fakta masih adanya masyarakat yang belum terdaftar menjadi calon pemilih dalam pemilu nanti. Kata kunci "proporsional terbuka" juga masih asing bagi sebagian besar masyarakat DKI Jakarta. Konsep baru dengan sosialisasi politik yang kurang dapat menimbulkan sikap apatisme dari anggota masyarakat. Di samping itu pemilu dengan sistem baru juga dapat menyebabkan banyak suara yang tidak sah dikarenakan terjadi kekeliruan menelusuri tanda gambar partai yang dikombinasikan dengan daftar orang (khususnya dalam memilih anggota legislative). Dari penelitian sejumlah LSM dan lembaga-lembaga survey terungkap fakta yang menyatakan masih besarnya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para calon pemilihan dalam melakukan pencoblosan. Kondisi ini juga sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu 2004.

11. Sikap dan perilaku elit politik dan *opinion leader* yang terkadang dapat memengaruhi situasi

politik dengan berbagai pendapat yang dapat memicu terjadinya konflik politik di dalam dan di antara warga masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan terbatasnya elit politik yang bisa dijadikan tokoh panutan masyarakat, keadaan ini sangat tidak mendukung terciptanya situasi politik yang damai. Peranan media massa juga berpengaruh dalam penyaluran pendapat para elit politik dan *opinion leader* tersebut dalam memberikan warna pada perkembangan dan situasi politik menjelang pemilu 2004.

Di samping sebelas kondisi tersebut di atas masih ada fakta-fakta lain yang berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap situasi politik menjelang pemilu 2004, yang tidak dibahas dalam tulisan singkat ini.

C. Penutup

Tanpa berniat untuk merisaukan serta menimbulkan kecemasan, harus diakui berbagai situasi menjelang pemilu 2004 tersebut sangat tidak menguntungkan. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan beberapa hal:

- 1) Terdapat kaitan yang sangat erat antara terselenggaranya Pemilu dengan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat mewarnai perilaku mereka dalam Pemilu.
- 2) Demokrasi bukan sekedar sistem politik dan sistem pemerintahan tetapi lebih mendasar adalah sebagai aturan permainan atau pedoman perilaku masyarakat sehari-hari.
- 3) Demokrasi dengan segala kelemahannya tetap diakui sebagai suatu sistem yang lebih memadai dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 4) Pemilu 2004 dihadapkan pada situasi politik yang kurang menguntungkan, berdasarkan hal itu maka perlu dilakukan beberapa hal di bawah ini.
 - a) Seluruh komponen bangsa harus dapat menahan diri dan berperan aktif untuk menetapkan situasi yang aman dan damai bagi semua.
 - b) Partai-partai politik dan para politisi baik yang bersaing dalam pemilu ataupun yang tidak, harus dapat memberi contoh perilaku yang beretika dan bermora, bagi masyarakat.
 - c) Tokoh masyarakat, pemimpin agama, intelektual, tokoh agama, LSM harus

dapat mengarahkan masyarakat pada semangat kesatuan dan persatuan bangsa dan memperkecil semangat fanatisme sempit, yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

d) Penyelenggara pemilu, KPU dan Panwaslu, harus benar-benar fokus dan tegas pada penyelenggaraan pemilu 2004, serta tidak terlibat dalam kegiatan logistik semata.

e) Media massa dan komponennya harus menyajikan

pemberitaan yang sejuak bagi masyarakat, guna mendukung terselenggaranya Pemilu yang aman dan damai.

f) Secara khusus bagi Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis bagi pendidikan politik warga DKI Jakarta, karena pendidikan politik adalah bagian dari pemberdayaan politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Terjemahan oleh Rahman Zainuddin). 1992. Penerbit Yayasan Obor, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* 1988. Penerbit P.T. Gramedia, Jakarta.

Tim Peneliti IAIN Jakarta. *Anarkisme dan Pemahaman Demokrasi*. Penelitian pada Masyarakat Menengah Bawah di DKI Jakarta 2001. Hasil Penelitian.

Tim Peneliti Fisipol UGM. *Model Pengelolaan Konflik Sosial*. Studi

Kasus Matraman Jakarta, 2000. Hasil Penelitian.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. 1960. New York: Oxford University Press.

Wade, E.C.S., and Godfrey Phillips. *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, The Citizen and The State and Administrative Law*. 7th ed. 1965. London: Longmans.

Tim Peneliti Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik Fisip Universitas Indonesia. *Partisipasi Masyarakat DKI Jakarta terhadap Pemilu 2004*. 2003. Hasil Penelitian.